

KONTRIBUSI PESANTREN PERSATUAN ISLAM BAGI PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Toto Suharto

IAIN Surakarta

Email: totosuharto2000@yahoo.com

Abstract

The Pesantren Persatuan Islam that formed in 1936, is one of the private educational institutions in Indonesia. Until 1999, this institution has 154 educational institutions spread all over Indonesia. Although the current views of Islamic politics in Indonesia Persatuan Islam is not the mainstream, because he was small and not strong, but its contribution to Islam in Indonesia should also be taken into account. The internal contributions of Pesantren Persatuan Islam can be seen from the aspect of indoctrination, that this institution is an event-style formulation of the Persatuan Islam religious understanding. Then externally, the contribution of Pesantren Persatuan Islam can be viewed in terms of institutions, namely the institutional system, called pesantren. Unlike boarding institution in the traditional understanding, for the Pesantren Persatuan Islam are synonymous with modernity, that is still oriented "boarding-centric", but with adaptive and accommodative attitude towards the development of science and technology originating from the West. With such institutional concept, Pesantren Persatuan Islam successfully gave birth to thousands of Muslim volunteers who spread to all parts of Indonesia. Number of Pesantren Persatuan Islam spread over almost the whole of Indonesia was already assured a large contribution to the strengthening of Islamic education in Indonesia.

مستخلص

المعهد الإسلامية Persatuan Islam التي تأسست في عام 1936 ، هي واحدة من المؤسسات التعليمية الخاصة في اندونيسيا. حتى عام 1999، والمعهد والمؤسسات التعليمية 154 تنتشر في جميع أنحاء إندونيسيا. وإن لم تكن الوحدة الإسلامية السائدة في كوكبة اندونيسيا السياسية، لأنه كان صغير ، ولكن يجب أيضا مساهمته في الإسلام في اندونيسيا أن تؤخذ بعين الاعتبار. يمكن اعتبار مساهمة الاتحاد الإسلامي للداخلية الداخلية من

الجانب من التلقين، أن هذه المؤسسة هي صياغة فهم الإسلام. ثم الخارجية، يمكن أن ينظر إلى إسهام الإسلام في المعهد الإسلامية Persatuan Islam حيث المؤسسات، وهما النظام المؤسسي. على عكس المؤسسات التقليدية في المعهد الإسلامية Persatuan Islam مرادف مع الحدائث، التي لا تزال موجهة نحو "المرتكرة على النوم"، ولكن. التكيف واستيعاب لتطوير العلوم والتكنولوجيا الغربية مع مفهوم المؤسسة وهكذا، فإن الاتحاد من مدرسة داخلية اسلامية تسليمها بنجاح الآلاف من المتطوعين الذين ينشرون مسلم إلى جميع أنحاء إندونيسيا.

Keywords: Pesantren, Persatuan Islam, Penguatan Pendidikan Islam

A. Latar Belakang

Deliar Noer telah membagi organisasi-organisasi Islam di Indonesia dari sudut keberadaannya sebagai gerakan Islam modern dalam dua kategori, yaitu gerakan Islam modern dalam bidang pendidikan dan sosial (*the educational and social movement*), dan gerakan Islam modern dalam bidang politik (*the political movement*).¹ Gerakan Islam modern yang masuk pada kategori pertama adalah gerakan-gerakan pembaruan di Minangkabau, gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Sedangkan gerakan Islam modern yang masuk dalam kategori kedua adalah Sarekat Islam, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) dan Partai Islam Indonesia (PII). Kemunculan gerakan dan organisasi-organisasi² ini dinilai Mukti Ali sebagai indikator dimulainya masyarakat Islam "modern" di Indonesia.³ Penilaian ini

¹ Deliar Noer, "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Dutch Colonial Period (1900-1942)" (Disertasi Ph.D. pada Cornell University, 1963), hal. 46.

² Kuntowijoyo menyebutkan dua pola gerakan perlawanan Islam Indonesia terhadap penjajahan Belanda, yaitu pola komunal dan pola asosiasional. Dengan meminjam istilah sosiologi dari Durkheim, pola pertama dilakukan atas dasar solidaritas mekanis yang terdapat dalam masyarakat komunal-lokal, sedangkan pola kedua dilakukan atas dasar solidaritas organis yang membentuk mekanisme organisasional. Pola asosiasional dimulai semenjak permulaan abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905. Baca Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), hal. 195-196.

³ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan NIDA, 1970), hal. 5.

didukung juga oleh Syafii Maarif yang menyatakan bahwa kemunculan organisasi-organisasi itu merupakan bukti bagi lahirnya gejala modern di Indonesia. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut muncul sebelum abad ke-20.⁴ Tumbuh-suburnya budaya berorganisasi Islam ini merupakan salah satu keunikan corak pemikiran Islam modern di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain, semisal Turki atau Arab Saudi.⁵

Menurut catatan Karel A. Steenbrink, ada empat kondisi yang menjadi sebab organisasi-organisasi itu lahir.⁶ *Pertama*, keinginan kaum Muslim Indonesia untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Keinginan yang muncul semenjak tahun 1900 ini dimotivasi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan murid-muridnya di Mesir yang berusaha menolak taklid. *Kedua*, sikap perlawanan dan penentangan terhadap kolonialisme secara nasional. *Ketiga*, upaya memperkuat posisi kaum Muslim Indonesia dalam bidang sosial-ekonomi. *Keempat*, keinginan untuk memperbarui sistem pendidikan Islam di Indonesia yang masih bercorak tradisional. Akan tetapi, demikian lanjut Steenbrink, sepanjang penelitian dilakukan, tidak semua organisasi-organisasi Islam itu muncul karena keempat faktor ini secara sekaligus. Tidak ditemukan contoh sempurna dalam hal ini.⁷

Berdasarkan kategorisasi Deliar Noer di atas, tampak bahwa Persatuan Islam, atau sering disingkat PERSIS yang berdiri di Bandung pada 12 September 1923 M (1 Shafar 1342 H), merupakan salah satu gerakan Islam modern yang cenderung menekankan aktivitas gerakannya dalam bidang pendidikan dan sosial. Persatuan Islam bukanlah organisasi yang bergelut dalam bidang *siyasah*, dalam arti politik praktis.⁸ Pandangan ini didukung juga oleh Howard M. Federspiel yang secara serius mengkaji Persatuan Islam. Menurutnya, sejak permulaan sekali Persatuan Islam telah menawarkan berbagai aktivitas pendidikannya. Bidang pendidikan telah mendapat penekanan serius dari Persatuan Islam.⁹ Atas dasar ini, Saifuddin Anshari

⁴ A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), hal. 104.

⁵ Lihat M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 242.

⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 26-28.

⁷ *Ibid.*, hal. 28.

⁸ Lihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 6.

⁹ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1970),

menilai bahwa popularitas Persatuan Islam pada masa-masa awal ditopang oleh bidang pendidikan yang diselenggarakannya, di samping juga oleh pendiriannya yang jelas dan tegas mengenai berbagai isu kontroversial.¹⁰

Persatuan Islam sebagai sebuah *jam'iyah* pendidikan dan sosial, dengan sendirinya memiliki sistem pendidikan tersendiri. Sistem pendidikan Persatuan Islam ini disebut dengan "Pesantren Persatuan Islam".¹¹ Sistem ini memiliki kurikulum pendidikan tersendiri yang berlaku bagi semua jenjang kependidikannya, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sistem pendidikan Persatuan Islam sesungguhnya terbentuk melalui proses historis yang cukup panjang. Semenjak kelahirannya, Persatuan Islam selaku *jam'iyah* pendidikan, tabligh dan kemasyarakatan telah menyelenggarakan pendidikan Islam secara khas dan partikelir.¹²

Dengan menggunakan istilah "pesantren" bagi nama lembaganya, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan sistem madrasah yang dikelola secara klasikal, Persatuan Islam berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada dalam koridornya, yaitu menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berjiwa pesantren, tapi berbeda dan berada di luar jangkauan birokrasi pendidikan pemerintah. A. Latief Muchtar,

hal. 18. Kajian yang merupkan disertasi doktoral ini berusaha memotret Persatuan Islam sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam di Indonesia, mulai dari masa berdirinya hingga masa Orde Lama. Di sini dikemukakan pandangan-pandangan keagamaan Persatuan Islam, polemiknya dengan Ahmadiyah dan berbagai aktivitas sosialnya, mulai dari bidang pendidikan, penerbitan, hingga penyesuaian-penyesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

¹⁰ H. Endang Saifuddin Anshari, *Ahmad Hassan: Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid* (Cet. I; t.tp: Firma al-Muslimun, 1985), hal. 13-14. Tulisan ini berasal dari kertas kerja yang disampaikan penulisnya pada "Seminar Falsafah dan Perjuangan Ahmad Hasssan" di Singapura tanggal 28-30 Januari 1979. Tulisan ini disatukan penerbitannya dengan karya Syafiq A. Mughni, *Pandangan Ahmad Hassan Mengenai Pelbagai Masalah Agama Serta Reaksi Terhadapanya*, dengan penerbit yang sama.

¹¹ Lihat Komisi Tajdidut Ta'lim Ke-2 Persatuan Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984), bab I pasal 1 (selanjutnya disebut *Pedoman* 1984); dan Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* (Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996), bab 1 pasal 1 (selanjutnya disebut *Pedoman* 1996).

¹² Sesudah tahun 1900-an banyak bermunculan sekolah-sekolah swasta atau partikelir. Sekolah-sekolah ini di antaranya didirikan oleh organisasi-organisasi Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan. Pada umumnya sekolah-sekolah swasta ini mendapat bantuan dari Pemerintah. Bantuan atau subsidi inilah kiranya yang telah membuat pesatnya penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta. Baca Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hal. 29.

seorang aktivis Persatuan Islam yang pernah menjabat Ketua Umum periode 1983 hingga 1997, menulis:

Sejak tahun 1950 sampai sekarang, tampaknya tidak seperti Muhammadiyah, tidak ada gagasan untuk mendirikan SD, SLTP, dan SMU atau model-model sekolah agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Karena, dalam pandangan Persis, tujuan pendidikan bukan untuk menjadi Pegawai Negeri. Karena itu, Persis tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren, sesuai dengan garis kebijakan yang didengungkan pada tahun 1936. Kebijakan ini tidak hanya untuk tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat cabang. Kurikulum pendidikannya sama, tidak terikat oleh kurikulum sekolah-sekolah Departemen Agama. Guru-gurunya sebagian besar adalah alumni tingkat Muallimin dari Pesantren Pusat di Bandung. Para alumnus pesantren ini bisa melanjutkan studinya di IAIN. Adapun alumnusnya yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi umum, biasanya mengikuti SMU pada sore hari.¹³

Pernyataan Muchtar di atas menunjukkan bahwa Persatuan Islam bukanlah organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah, berbeda dengan pendidikan yang dikelola Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. NU misalnya, telah menyelenggarakan pendidikan Islam yang disebut Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yang menurut catatan Imam Chuseno, lembaga pendidikan ini belum mempunyai sistem dan kurikulum pendidikan yang dikeluarkannya. Sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU adalah sistem dan kurikulum pendidikan pemerintah, ditambah dengan muatan ke-NU-an dan bidang studi agama yang berciri Aswaja (*Ahlussunnah wal Jama'ah*).¹⁴ Demikian pula dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Menurut Achmadi, Muhammadiyah telah membentuk madrasah dan sekolah, yang secara institusional berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah senantiasa disesuaikan dengan corak dan susunan lembaga pendidikan pemerintah. Pokok pengajaran madrasah-madrasah Muhammadiyah sejalan dengan pokok pengajaran madrasah di bawah

¹³ Abdul Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 224. Buku ini memotret semua pemikiran penulisnya mengenai sejarah dan masyarakat Islam, peranan dan tantangan Persatuan Islam, dan berbagai masalah hukum Islam, baik tekstual maupun kontekstual.

¹⁴ Imam Chuseno. "Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Mukhtamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Mukhtamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990" (Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hal. 204-206.

Kementerian Agama, demikian pula lembaga-lembaga sekolahnya disesuaikan dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecenderungan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah ini telah membuat tidak relevannya pendidikan Muhammadiyah dengan cita-citanya.¹⁵

Menarik mencermati kiprah lembaga Pesantren Persatuan Islam ini adalah melihat kontribusinya bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia. Persatuan Islam meskipun dinilai Federspiel sebagai organisasi yang “small and loosely knit”, karena tidak menjadi *mainstream* bagi arus perpolitikan Islam di Indonesia,¹⁶ namun semenjak berdirinya hingga sekarang, ia termasuk organisasi yang serius menyelenggarakan pendidikan Islam di Indonesia. Menurut data statistik dari *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan*, hingga tahun 1999, organisasi Persatuan Islam telah memiliki 154 Pesantren Persatuan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan sebaran sebagai berikut:¹⁷

No.	Propinsi	Jumlah Pesantren Persatuan Islam	Jumlah Santri
1.	DKI Jakarta	5	1.160
2.	Jawa Barat	135	29.813
3.	Jawa Timur	5	2.149
4.	Sumatera Utara	1	57
5.	Bengkulu	2	134
6.	Lampung	1	38
7.	Kalimantan Barat	1	95
8.	Sulawesi Tengah	1	110
9.	NTT	3	236
	TOTAL	154	33.792

Sumber: Diolah dari *Wajah Pesantren Persatuan Islam* Tahun 1999

Dengan jumlah pesantren sebanyak 154 dan jumlah santri yang mencapai 33.792, tentu saja Pesantren Persatuan Islam memiliki arti dan kontribusi bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum dibahas apa dan bagaimana

¹⁵ Achmadi, “Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan” (Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hal. 140-152.

¹⁶ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. iv.

¹⁷ Lihat Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan* (Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1999), hal. 6-40.

kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia, terlebih dahulu dipaparkan mengenai makna pesantren bagi Persatuan Islam dan model kelembagaan pesantren dalam sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam.

B. Makna Pesantren Bagi Persatuan Islam

Beberapa *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* yang dihasilkan pada setiap muktamar yang diselenggarakannya selalu saja dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa organisasi atau “jam’iyyah ini (demikian biasanya Persatuan Islam menyebut dirinya) bergerak dalam bidang pendidikan, tabligh, dan sosial kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan al-Qur’an dan Sunnah”.¹⁸ *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1984, yang dibuat pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan bagi Persatuan Islam adalah mengeluarkan manusia dari kesesatan yang gelap-gulita kepada petunjuk Allah yang terang-benderang, dalam rangka membentuk pribadi Muslim yang segala tingkah lakunya ditujukan untuk mengamalkan segala ajaran Islam sesuai tuntunan al-Qur’an dan Sunnah.¹⁹ Di sini juga disebutkan bahwa bagi Persatuan Islam, tujuan pendidikan adalah mendidik para calon ulama yang *tafaqquh fi al-din*, sebagai sebuah kekhususan yang dimiliki organisasi Persatuan Islam. Tujuan ini dilaksanakan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Yang menarik di sini bahwa yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah penyelenggaraan pendidikan “pesantren”.²⁰

Kenyataan itu dipertegas lagi di dalam *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* tahun 1984 dan 1996 yang menyebutkan bahwa “lembaga pendidikan jam’iyyah Persatuan Islam ini dinamakan Pesantren Persatuan Islam”.²¹ Pesantren Persatuan Islam merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen, dan kegiatan pendidikan Persatuan Islam, dari jenjang pendidikan prasekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan Persatuan Islam dengan sistem kepesantrenan ini berusaha memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum sesuai dengan sifat kekhususannya.²² Pesantren

¹⁸ Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1981, 1990, 1995, dan 2000, yang biasanya dimuat dalam pasal tentang bentuk dan sifat organisasi. Akan tetapi, sebelum tahun-tahun ini, penekanan dalam bidang organisasi dicantumkan sebagai rencana jihad khusus. Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1968.

¹⁹ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 21-24.

²⁰ *Ibid.*, hal. 33-34.

²¹ Lihat *Pedoman* 1984, bab I pasal 1, dan *Pedoman* 1996, bab I pasal 1.

²² *Pedoman* 1996, bab I pasal 1.

Persatuan Islam dengan demikian tidak mengenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Sebegitu kuatnya Persatuan Islam menisbatkan dirinya dengan lembaga “pesantren” ini, sehingga disebutkan “Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam’iyyah*. Karena itu, sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang, dan Insya Allah pada masa-masa yang akan datang”.²³ Lebih jauh lagi disebutkan, keterkaitan Persatuan Islam dengan lembaga “pesantren” nya menunjukkan bahwa eksistensi Persatuan Islam itu sendiri tergantung pada lembaga pendidikannya ini.

Bila sifat pesantren telah tiada, maka berarti khiththah perjuangan ‘Persatuan Islam’ yang semula dan asli telah hilang. Demikian, dengan sendirinya ‘Persatuan Islam’ itu sendiri akan lenyap dan tidak perlu ada lagi. Sebab, garapan-garapan yang semestinya digarap oleh ‘Persatuan Islam’ tidak digarap lagi dan telah atau sedang digarap oleh *jam’iyyah* Islam lainnya.²⁴

Begitulah Pesantren Persatuan Islam menjadi identik keberadaannya dengan Persatuan Islam itu sendiri, yang karenanya sekuat mungkin ia senantiasa dipertahankan eksistensinya.

Istilah “Pesantren Persatuan Islam” untuk kali pertama digunakan semenjak 1936, yaitu ketika dibentuk lembaga pendidikan yang bernama Pesantren Persatuan Islam pada 4 Maret 1936. Menurut *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng*, pesantren ini didirikan sebagai upaya melaksanakan keputusan “Conferentie Persatoean Islam 1935” yang menuntut Pengurus Besar (sekarang Pimpinan Pusat) Persatuan Islam untuk mengadakan “Cursus Moeballigh”.²⁵ Menurut *Qanoen* ini, tujuan diselenggarakannya Pesantren Persatuan Islam adalah:

Semata-mata hendak mengeloearkan moeballigh-moeballigh dengan mengadjarkan bahasa Arab dan alat-alatnja dan ‘ilmoe-’ilmoe agama Islam yang perloe, dan sedikit-sedikit dari peladjaran agama-agama lain, dan sedikit-sedikit dari ‘ilmoe menghitoeng, djiografi, ‘ilmoe ‘alam, dan lain-lain ‘ilmoe kedoeniaan jang akan menolong seorang moeballigh di dalam pekerjaannja bertabligh.²⁶

Untuk memenuhi tujuan ini, dibentuk “nazhir-nazhir” (para pengurus) Pesantren Persatuan Islam yang dipilih oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang

²³ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 6.

²⁴ *Ibid.*, hal. 7.

²⁵ Lihat *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* 1936, yang dimuat dalam *Al-Lisan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Moeharram 1355), hal. A.

²⁶ *Ibid.*

bertugas mengubah, menambah, dan mengurangi isi “Qanoen Pesantren” ini sesuai keadaan dan perubahan zaman. Pengurus inti Pesantren Persatuan Islam ini adalah Ahmad Hassan (ketua), H. Zamzam (wakil ketua), Samsudin (sekretaris), dan Nastari (bendahara), yang dibantu oleh H. Azhari, E. Abdurrahman, H.M. Ramli, Kemas Ahmad, dan M. Natsir. Adapun guru-guru yang mengajar di Pesantren Persatuan Islam ini adalah H. Zamzam, H. Azhari, H.M. Ramli, E. Abdurrahman, O. Qamaruddin, M. Natsir, Fachruddin, Samsudin, A.A. Bana-ama, Sulaiman Abu Su’ud, A. Hassan, dan Abdul Kadir Hassan.²⁷

Adapun kurikulum yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk dapat mencetak santri menjadi muballigh Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, yang mencakup matapelajaran tauhid, fikih, baca al-Qur’an, tajwid, sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadis, khat, ushul fiqih, bacaan, badi’, ma’ani, mantiq, bahasa Melayu, dan ilmu-ilmu umum yang meliputi ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, dan ilmu-ilmu lain yang dipandang perlu. Semua kurikulum ini disajikan kepada santri dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, dan bahasa Arab sebagai penunjang yang digunakan dalam waktu-waktu tertentu.²⁸

Dari *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* itu kiranya dapat dikatakan bahwa Pesantren Persatuan Islam ketika itu sudah dapat mengelola pendidikan dengan cara-cara “modern” untuk masanya. Kurikulum yang memadukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum ini membuktikan bahwa Pesantren Persatuan Islam pada saat itu sudah mengenal kurikulum integralistik, yang tidak mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Apalagi sudah ada muatan pelajaran jurnalistik, yang menandakan bahwa santri-santri alumninya kelak diharapkan menjadi penulis-penulis yang dapat menunjang aktivitas Persatuan Islam dalam bidang penerbitan, yang memang menjadi salah satu media organisasi ini untuk menyebarkan paham kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, adanya *Qanun* ini juga yang menjadikan “pesantren” dalam perspektif Persatuan Islam berbeda dengan “pesantren” dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

Sebenarnya apa itu pesantren bagi Persatuan Islam? Istilah “pesantren” dalam Persatuan Islam sangatlah berbeda rumusannya dengan istilah pesantren dalam

²⁷ *Ibid.*, hal. D.

²⁸ *Ibid.*, hal. C. Selain memuat guru-guru dan para pengurus Pesantren Persatuan Islam, *Qanun* ini juga berisi tentang tempat pesantren diadakan, hasil dan belanja pesantren, syarat-syarat dan kewajiban murid, waktu belajar dan masa pendidikan (tiga tahun).

sistem pendidikan tradisional. Menurut Federspiel, pesantren dalam sistem pendidikan tradisional sering dipahami sebagai lembaga pribadi milik ulama, yang umumnya dikelola dengan bantuan keluarga mereka. Pada masa yang paling awal, pesantren merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pengajarannya didasarkan pada “kitab klasik” (*kitab kuning*) karya para ulama terkemuka abad Pertengahan (1250-1850 M), yang biasanya dari mazhab hukum Syafi’i. Materi pengajarannya selalu mencakup tatabahasa Arab (*nahwu*) dan konjugasinya (*sharf*), seni baca al-Qur’an (*qira’ah*), tafsir al-Qur’an, tauhid, fiqih, akhlaq, mantiq, sejarah, dan tasawuf. Semua materi ini diajarkan dengan metode *weton* atau *halaqah*, di mana para pelajar duduk melingkar di depan seorang ulama, yang duduk dan menyuruh para muridnya secara bergantian untuk membaca *Kitab Kuning*. Pada abad ke-20, pesantren tradisional mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk mengadopsi teknik-teknik baru dan memasukkan beberapa matapelajaran umum. Banyak pesantren yang memberinya respons dengan positif, sehingga menjadi pesantren modern, pesantren madrasah, atau pesantren sekolah yang mengikuti sistem pemerintah.²⁹ Kemudian secara antropologis Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen bagi lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren ini, yaitu adanya pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai.³⁰

Terma “pesantren” dalam Persatuan Islam tidaklah merujuk kepada pemahaman pesantren seperti yang disebutkan di atas. Pesantren bagi Persatuan Islam, seperti disebutkan dalam *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*, bukanlah lembaga yang memberikan citra kejumudan, keterbelakangan, sekularisme atau fatalisme. Pesantren dalam Persatuan Islam lebih berarti sebagai pesantren yang dinamis dan modernis (*mujaddid*), yaitu pesantren yang berusaha mengubah dan merombak citra negatif pesantren.³¹ Di sini, K.H. A. Latief Muchtar, MA menambahkan beberapa keunggulan yang dimiliki lembaga model pesantren. Dia menulis:

Pesantren dengan sifatnya yang populis sangat akrab dan menyentuh masyarakat banyak, terutama di pedesaan, di mana sebagian besar penduduk Indonesia berada.

²⁹ John L. Esposito (editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3 (New York: Oxford University Press, 1995), di bawah kata “Pesantren” oleh Howard M. Federspiel, hal. 324-326.

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 44-60.

³¹ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 7.

Sifat populis yang mengakar ini merupakan kekuatan pesantren, sehingga keberadaannya tidak tergoyahkan...

Di samping itu, pondok pesantren juga memiliki kelebihan. Dilandasi oleh niat untuk ibadah kepada Allah, pondok pesantren berhasil mengembangkan lapisan umat yang memiliki komitmen keagamaan secara ikhlas, keimanan dan ketakwaan yang kuat...

Kelebihan lain adalah sikap kemandirian. Dengan modal sikap ini, begitu kembali ke tempat asalnya, lulusan pesantren menjadi manusia-manusia yang mandiri dalam berusaha dan mencari nafkah...Hal ini sungguh sangat positif, karena manusia yang memiliki sikap kemandirian seperti itu sangat diperlukan...mereka bisa mengentaskan umat dari kemiskinan dan keterbelakangan.³²

Itulah makna pesantren bagi Persatuan Islam, sehingga lembaga pendidikannya disebut Pesantren Persatuan Islam, sebuah pesantren dengan “gaya baru”, yang berbeda dengan pesantren “gaya lama”.³³ Oleh karena itu, bagi Federspiel, yang menjadi pembeda antara pesantren dalam pengertian lembaga tradisional dengan “pesantren” dalam pengertian Persatuan Islam adalah masalah metodenya. Jika para ulama (kyai) melalui pesantren tradisionalnya menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan *master-student* (kyai-santri) atau yang disebut *weton*, maka Persatuan Islam dengan pesantrennya menggunakan metode klasikal (*classrooms*).³⁴

C. Model Pendidikan ala Pesantren Persatuan Islam

Kemunculan bentuk kelembagan “pesantren” ala Persatuan Islam itu kiranya tidak dapat dilepaskan dari modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pandangan Azyumardi Azra, modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia sesungguhnya tidak bersumber dari kaum Muslim Indonesia sendiri. Sistem pendidikan modern justru untuk kali pertama diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda. Sejak dasawarsa 1870-an pemerintah Belanda sudah mulai mendirikan *volkschoolen* atau sekolah rakyat di beberapa tempat di Indonesia dengan masa

³² K.H. A. Latief Muchtar, “Peran, Fungsi dan Kontribusi Pendidikan Persis dalam Era Globalisasi”, dimuat dalam kumpulan karangan K.H. A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 179-180.

³³ Istilah pesantren “gaya baru” yang merujuk kepada pesantren-pesantren yang dikelola Persatuan Islam digunakan majalah *Risalah* untuk membedakannya dengan pesantren “gaya lama” yang dikelola secara tradisional. Lihat rubrik sorotan utama “Bertahan Gaya Pesantren”, *Risalah*, No. 11/XXIX, Maret 1992, hal. 12-14.

³⁴ Howard M. Federspiel, “Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited”, *al-Ja’ami’ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999, hal. 54.

belajar tiga tahun.³⁵ Untuk merespons sistem pendidikan Belanda ini, gerakan modern Islam di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20 menyerukan perlunya pembaruan sistem pendidikan Islam. Dalam konteks ini, muncul dua bentuk lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia. *Pertama*, sekolah-sekolah umum model Belanda dengan diberi muatan pengajaran Islam. *Kedua*, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.³⁶ Di samping kedua model ini, model tradisional dalam bentuk pesantren masih terus berlangsung, yang menurut Nurcholish Madjid merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia.³⁷ Dari ketiga model ini, yaitu model sekolah umum yang diberi muatan Islam, model madrasah yang mengadopsi pola klasikal, dan model pesantren yang asli Indonesia, Persatuan Islam kiranya berusaha memadukan model madrasah dengan model pesantren, sehingga disebut “Pesantren Persatuan Islam”.

Di dalam menanggapi model pendidikan pesantren *ala* Persatuan Islam itu, Deliar Noer berpendapat bahwa model pendidikan yang dilaksanakan Persatuan Islam lebih merupakan perpaduan antara sistem pendidikan model Barat yang menekankan pelajaran “umum” dengan sistem pendidikan agama yang tetap berlandaskan Islam. Sistem ini tidak ada bedanya dengan sistem madrasah pesantren.³⁸ Sementara itu, Jusuf Amir Feisal mengatakan bahwa sistem pendidikan Persatuan Islam merupakan “simbiosis” antara pesantren dan sekolah Islam. Kurikulumnya berkarakteristik agama, tetapi administrasinya mengikuti model sekolah Islam.³⁹ Dalam pada itu, Azra lebih suka menyebut model seperti Pesantren Persatuan Islam ini dengan sebutan “sekolah Islam”, karena pendidikan di sekolah-sekolah Persatuan Islam lebih ditekankan pada aspek keagamaan. Menurutnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara sekolah Islam dengan sekolah umum (negeri). Yang membedakan keduanya adalah penekanan khusus pada matapelajaran

³⁵ Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, Pengantar untuk Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hal. xii.

³⁶ *Ibid.*, hal. xiv.

³⁷ Nurcholish Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1985), hal. 3. Tulisan ini dimuat ulang dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3-18.

³⁸ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 52.

³⁹ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 103.

agama. Sekolah Islam memiliki lebih banyak matapelajaran yang berhubungan dengan Islam, sehingga memiliki jam belajar yang lebih banyak untuk matapelajaran agama. Adapun sekolah negeri juga wajib menyajikan matapelajaran agama, namun dengan jumlah jam belajar yang lebih terbatas, yaitu dua jam perminggu.⁴⁰

Sejak *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandung* dirumuskan pada 1936 hingga masa sekarang, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan istilah Pesantren Persatuan Islam. Padahal, jika dilihat dari segi proses pendidikannya, lembaga ini tidak ada bedanya dengan madrasah pesantren, yaitu model madrasah yang diasramakan. Unikny, Persatuan Islam tidak menyebutnya dengan madrasah, tapi tetap mempertahankan “jiwa pesantrennya”. Inilah mungkin makna dari pernyataan K.H. A. Latief Muchtar, MA bahwa “Persis tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren”.⁴¹

Model kelembagaan pendidikan “madrasah dengan jiwa pesantren” inilah kiranya yang dicobaterapkan oleh Persatuan Islam, di saat organisasi-organisasi pembaruan Islam lainnya, semisal Muhammadiyah, hanya mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan model Barat, tapi dengan muatan Islam. Muhammadiyah dengan model ini telah menggunakan sistem klasikal, yang berarti meninggalkan metode *weton* dan *sorogan* yang ada dalam sistem tradisional saat itu. Pendirian lembaga Muhammadiyah, yang oleh Steenbrink disebut dengan model “sekolah gubernemen”,⁴² merupakan kepedulian utama Ahmad Dahlan dalam mengimbangi dan menandingi sekolah pemerintah Belanda. Dia merasa terkesan dengan kerja para misionaris Kristen yang mendirikan sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Dengan mencontoh ini, Dahlan telah menciptakan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan agama sebagai matapelajaran wajib. Ilmu bahasa dan ilmu pasti disampaikan dalam Muhammadiyah sebagai matapelajaran yang mengimbangi matapelajaran agama (akidah, al-Qur’an, tarikh, dan akhlak). Di samping model “sekolah gubernemen”, Muhammadiyah juga mendirikan model madrasah yang tujuan utamanya adalah mengganti dan memperbaiki pengajaran al-Qur’an yang waktu itu masih bercorak tradisional.⁴³

⁴⁰ Azyumardi Azra, “The Rise of Muslim Elite Schools: a New Pattern of ‘Santrization’ in Indonesia”, *Al-Ja>mi’ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999, hal. 66.

⁴¹ A. Latief Muchtar, “A. Hassan, Persis dan Pemikiran Fikihnya”, sebagaimana dimuat dalam A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 224.

⁴² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, hal. 54.

⁴³ *Ibid.*, hal. 55.

Berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren yang mengenal metode *weton* dan *sorogan*, dan berbeda dengan madrasah Muhammadiyah yang lembaganya tetap disebut madrasah, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan istilah “pesantren”, padahal dari segi substansinya tidak lain adalah “madrasah dengan jiwa pesantren”. Disebut madrasah karena dilaksanakan secara klasikal, dan disebut pesantren karena mengambil manfaat dari keunggulan-keunggulan pesantren sehingga disebut “pesantren gaya baru”. Model ini dipertahankan Persatuan Islam yang merupakan ciri khasnya, sehingga memiliki keunikan tersendiri, yang dapat dibedakan dari pesantren tradisional dan madrasah Muhammadiyah.

Dengan lembaga pendidikannya yang disebut Pesantren Persatuan Islam, lembaga ini melaksanakan kegiatan pendidikannya melalui tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah.⁴⁴ Jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal,⁴⁵ berjenjang, berkesinambungan, dan berkelanjutan.⁴⁶ Adapun jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah dilaksanakan tidak harus berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan yang masuk jalur luar pesantren dan luar sekolah ini adalah pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, pengajian, tadarusan, dan sejenisnya yang ditujukan untuk meningkatkan akidah, syariah, akhlak mulia serta nilai budaya dan keterampilan tertentu.⁴⁷

Oleh karena jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal, berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan, maka jenjang-jenjang pendidikan yang ada pada kedua jalur ini adalah: pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-Kanak Islam atau disebut RA (Raudlatul Athfal), Kelompok Bermain, dan Penitipan Anak, yang semuanya berada di bawah naungan Persatuan Istri (Persistri) Persatuan Islam.⁴⁸ Bentuk satuan pendidikan dasar meliputi pendidikan Ibtidaiyah, Diniyah Ula, Tajhiziyah, Tsanawiyah, dan Diniyah Wustha. Pendidikan Ibtidaiyah dan Diniyah Ula

⁴⁴ Lihat *Pedoman* 1996, bab I pasal 2.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, bab IV pasal 10.

⁴⁷ *Ibid.*, bab IV pasal 11.

⁴⁸ *Ibid.*, bab V pasal 13.

diselenggarakan 6 (enam) tahun sejajar dengan SD, sedangkan pendidikan Takhziziyah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebagai persiapan memasuki Tsanawiyah bagi yang berasal dari tamatan SD. Adapun pendidikan Tsanawiyah dan Diniyah Wustha dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMP.⁴⁹ Kemudian bentuk satuan pendidikan menengah hanya mencakup pendidikan Muallimin dan Aliyah yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMA. Satuan ini memiliki tiga program pengembangan khusus, yaitu ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial/bahasa.⁵⁰ Jenjang pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah (Bidgar Dikdasmen) PP Persatuan Islam, sedangkan bentuk satuan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Tinggi (Bidgar Dikti) PP Persatuan Islam dalam pengelolannya.

D. Pesantren Persatuan Islam dan Penguatan Pendidikan Islam

Bagi Federspiel, arti penting Persatuan Islam bagi kaum Muslim Indonesia, utamanya terletak pada usahanya menentukan apa itu Islam, apakah prinsip-prinsip ajaran Islam, dan apakah amalan yang tepat bagi kaum Muslim. Persatuan Islam telah mengupayakan agar kaum Muslim menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya ini kiranya perlu dilakukan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.⁵¹ Untuk mewujudkan arti pentingnya itu, Persatuan Islam telah mengadakan proses pendidikannya secara swasta melalui lembaganya yang disebut Pesantren Persatuan Islam.

Menurut Soedjiarto, perguruan swasta di Indonesia masih belum memiliki kedudukan yang jelas. Baik UUSPN 1989 maupun UU Sisdiknas 2003 belum memuat ketentuan hukum yang tegas tentang kedudukan perguruan swasta dalam sistem pendidikan nasional. Kedua UU ini hanya menyiratkan mengenai posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah (Pasal 47 UUSPN 1989) dan peran serta masyarakat (Pasal 54 UU Sisdiknas 2003). Karena itu, kedudukan perguruan swasta masih terlihat "samar". Dalam masyarakat demokrasi yang eksekutif dan legislatifnya dipilih secara langsung, pengertian masyarakat sesungguhnya dimaksudkan sebagai seluruh

⁴⁹ *Ibid.*, bab V pasal 14.

⁵⁰ *Ibid.*, bab V pasal 15.

⁵¹ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal 186.

masyarakat, yang karenanya ketentuan pemerintah dalam tatanan demokrasi sejatinya adalah ketentuan yang mewakili rakyat. Dalam UU Sisdiknas 2003 dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, maksudnya adalah pemerintah yang mewakili rakyat, bukan pemerintah yang mewakili kepentingan rezim, mewakili kepentingan seorang tiran atau *oligarch*.⁵² Namun demikian, lanjut Soediarjo, walaupun kedudukannya belum jelas, perguruan swasta tetap mengalami pertumbuhan yang subur. Sepanjang pemerintah belum mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya secara memadai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan swasta harus tetap dapat menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memfungsikan peran institusionalnya, yaitu sebagai pusat kebudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap waraga negara Indonesia, dalam rangka mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional itu. Dalam konteks ini, perguruan swasta memiliki peran yang sama dengan sekolah-sekolah negeri, yaitu menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ini.⁵³

Sebagai sebuah perguruan swasta Islam, Pesantren Persatuan Islam kiranya memiliki peran yang sama dengan madrasah-madrasah negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, sebagai lembaga swasta yang notabene berkarakter “Islam”, Pesantren Persatuan Islam tentunya memiliki watak dan ideologi pendidikan tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Menurut catatan Dadi Darmadi, Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga pendidikan “kader” yang berupaya mencetak pribadi Muslim yang *tafaqquh fi> al-di>n*, dalam rangka menyebarkan paham kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah.⁵⁴ Di sini, perpaduan aspek pendidikan dan aspek dakwah menjadi hal penting dalam lembaga pendidikan ini. Aspek pendidikan yang dilaksanakan secara formal senantiasa diiringi dengan aspek dakwah yang dilakukan secara non-formal. Sejak mulai tingkat tsanawiyah dan diniyah wustha, para santri sudah mulai diperkenalkan dengan berbagai pelatihan dan metode dakwah. Bagi santri yang dipandang cakap, diamanatkan untuk terjun berdakwah ke masyarakat. Cara ini dimaksudkan agar mereka memiliki pengalaman berdakwah, yang kelak betul-betul menjadi da’i mandiri. Sementara

⁵² Soedjiarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 238-239.

⁵³ *Ibid.*, hal. 241-242.

⁵⁴ Dadi Darmadi, “Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur’an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat”, *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 56.

itu, untuk pendalaman materi keagamaan, para santri juga mengadakan diskusi yang disebut *bahjs} al-kutub* mengenai kitab-kitab tertentu yang menjadi rujukan lembaga ini. Gagasan pengakaderan santri juga dilakukan melalui pembinaan organisasi; bagi santri putera dalam wadah yang disebut *Rijalul Ghad* dan bagi santri puteri disebut *Ummahatul Ghad*. Kedua organisasi ini dalam lingkungan Persis bertujuan untuk menggodok mental calon pemimpin yang siap berorganisasi dalam masyarakat.⁵⁵

Dengan proses pendidikan semacam itu, wajar kalau lembaga Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga kader, yang mencetak pemimpin, pendidik, dan da'i yang menyemangati paham kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Inilah mungkin yang menjadi identitas dan watak yang dimiliki Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga perguruan Islam swasta. Diakui Mardiatmadja, lembaga perguruan swasta senantiasa hadir dengan membawa identitas dan ciri khasnya sendiri. Identitas ini merupakan simbol yang menunjukkan eksistensinya. Harga diri suatu perguruan swasta sangat tergantung pada identitasnya; termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta keunikannya yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun, kecuali oleh dirinya sendiri.⁵⁶

Kemudian, apa kontribusi Pesantren Persatuan Islam? Bagi kalangan internal Persatuan Islam, Pesantren Persatuan Islam sejak awal berdirinya merupakan wadah institusional yang ditujukan untuk mencetak *thâifah mutafaqqihûn fî al-dîn* yang menjadi "penyebar paham keagamaan ala Persatuan Islam", yaitu paham *al-rujû'ila al-Qur'an wa al-Sunnah* yang banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.⁵⁷ Lembaga ini merupakan lembaga kader bagi Persatuan Islam, yang bertujuan mencetak muballigh-muballigh Persatuan Islam yang akan menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, menarik mengungkapkan pengakuan alumni Pesantren Persatuan Islam yang menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki santri alumni Persatuan Islam Persatuan Islam adalah bahwa mereka memiliki sikap militansi yang lebih, dibanding calon generasi yang ada di ormas-ormas lain, semisal Muhammadiyah atau NU. Kelebihan militansi

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 57.

⁵⁶ Mardiatmadja, "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam <http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm> (diunduh 20 Pebruari 2010).

⁵⁷ Lihat Tiar Anwar Bachtiar, "Pendidikan Persis Mau Dibawa Ke Mana?", dalam Tim Litbang PW Pemuda Persis Jabar (ed.), *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis* (Cet. I; Bandung: Granada, 2005), hal. 41-42.

ini utamanya disebabkan karena adanya dimensi doktrin kependidikan, yaitu bahwa Persatuan Islam telah menjadikan lembaga pesantrennya sebagai *wasilah* untuk menyebarkan doktrin-doktrin Persatuan Islam. “Hal ini tentu sangat menunjang dalam hal militansi calon generasi Persis”, demikian pengakuan Nandang Burhanudin.⁵⁸

Menurut penilaian Tiar Anwar Bachtiar, para santri periode awal telah berhasil menjadi para muballigh yang terjun ke daerah masing-masing, menyebarkan paham keagamaan Persatuan Islam. Akan tetapi, karena kebanyakan alumni era ini tidak ada keinginan untuk mendirikan cabang, karena kebijakan pimpinan Persatuan Islam pada waktu itu lebih mengarah pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas, maka hingga tahun 1980, secara *de facto* Persatuan Islam hanya memiliki dua pesantren besar, yaitu Pesantren Persatuan Islam Bangil (pimpinan Ahmad Hassan) dan Pesantren Persatuan Islam Bandung (pimpinan E. Abdurrahman). Ini pun bukan karena santrinya banyak, tapi lebih disebabkan karena ulama-ulama Persatuan Islam ada di kedua pesantren ini. Kemudian pada pertengahan 1980-an, kedua alumni pesantren ini banyak yang berinisiatif mendirikan pesantren-pesantren sejenis, yang akhirnya Pesantren Persatuan Islam banyak berdiri di mana-mana hingga mencapai lebih dari 150 pesantren. Sejak meningkatnya jumlah pesantren ini, warga Persatuan Islam meyakini bahwa Pesantren Persatuan Islam adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sesuai dengan misi dan cita-cita Persatuan Islam, yang karena itu Pesantren Persatuan Islam menjadi semacam *trend* bagi pendidikan warga Persatuan Islam.⁵⁹

Dari hal di atas kiranya dapat dikatakan bahwa Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi yang besar bagi kalangan internal Persatuan Islam, yaitu sebagai ajang penggodokan paham keagamaan *ala* Persatuan Islam. Bahkan, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* 1984 secara tegas menyebutkan bahwa “Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam’iyyah*. Karena itu, sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang, dan Insya Allah pada masa-masa yang akan datang”.⁶⁰ Artinya, Pesantren Persatuan Islam adalah Persatuan

⁵⁸ Nandang Burhanudin, “Menggagas Sistem Kaderisasi dan Komunikasi Handal di Lingkungan Jam’iyyah Persatuan Islam: Suatu Harapan dan Tantangan”, dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Persis Menjadi Mujaddid Lagi? Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru* (Cet. I; Bandung: Alqaprint Jatinangor-Lembaga Penerbitan Fospi, 2000), hal. 219.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 47-48.

⁶⁰ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili “Persatuan Islam”* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 6.

Islam itu sendiri, dan Persatuan Islam itu sendiri adalah Pesantren Persatuan Islam. Ia merupakan lembaga kader yang dapat menentukan mati-hidupnya organisasi Persatuan Islam. Kondisi ini sebanding dengan Madrasah Mu'allimin/Mu'allimat Muhammadiyah yang merupakan lembaga pendidikan kader bagi organisasi Muhammadiyah.⁶¹ Namun, berbeda dengan Pesantren Persatuan Islam, madrasah ini tidak menjadi penentu hidup-matinya Muhammadiyah.

Kemudian bagi eksternal umat Islam Indonesia, Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi utamanya dari segi kelembagaan. Menurut catatan editor Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat, Persatuan Islam mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam bidang pendidikan, yang dapat dilihat dari segi kelembagaan bentuk pesantren, yaitu:

Konsep "pesantren" yang diambil dari khazanah pengetahuan Islam klasik (tradisional) dapat dipadukan dengan sistem pendidikan modern dari Barat (Belanda). Sebuah modifikasi yang unik. Orientasinya tetap "pesantren-centric", yakni *li yatafaqqahû fi al-din* (untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan mencetak kader ulama), tetapi tidak apriori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Barat.⁶²

Dengan konsep kelembagaan seperti itu, Pesantren Persatuan Islam berhasil melahirkan ribuan kader Muslim yang tidak hanya paham syari'at, tetapi juga "gaul" dengan perkembangan zaman. Bila pada organisasi modernis semisal Muhammadiyah pernah mengalami krisis kader ulama, Persatuan Islam justru "kelebihan" ulama walau hanya sedikit yang naik ke pentas nasional, sebut saja misalnya K.H. Latief Muchtar, MA (w. 1997), K.H. Endang Saefudin Anshary, MA (w. 1995), Prof. Syafiq Mughni, Prof. Yusuf Amir Faisal, dan sebagainya.⁶³ Ribuan kader Muslim yang merupakan santri alumni Pesantren Persatuan Islam ini tentunya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka merupakan aset Islam Indonesia, yang dengan semangat militansi yang kuat mereka tetap menyebarkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Islam di Indonesia diniscayakan mengalami penguatan.

Kemudian secara nasional, sebagai sebuah perguruan swasta, Pesantren Persatuan Islam tentunya juga dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang ikut dalam meningkatkan dan mendukung upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan

⁶¹ Informasi mengenai Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah sebagai lembaga kader, silakan akses "Profil Mu'allimin", dalam http://muallimin.org/?page_id=3 (diunduh 28 Januari 2010).

⁶² Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat, "Pengantar Editor" untuk *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis* (Cet. I; Bandung: Granada, 2005), hal. xx.

⁶³ *Ibid.*, hal. xxi.

jumlah pesantren sebanyak 154 pada 1999, dan dengan jumlah satuan pendidikan yang begitu beragam, mulai dari jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, kontribusi Pesantren Persatuan Islam dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) kiranya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut Safrudin Chamidi, dengan mengambil data kuantitatif tahun 1997-1999, kontribusi madrasah swasta pada pembangunan pendidikan di Indonesia cukup bervariasi. Pada jenjang pendidikan prasekolah, kontribusi madrasah swasta sangat besar, yaitu bahwa hampir seluruh RA/BA diselenggarakan oleh lembaga swasta. Sementara itu, untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, MI swasta sangat mendominasi, yaitu lebih dari 93% dikelola secara swasta. Selanjutnya, untuk jenjang madrasah tsanawiyah terdapat kecenderungan mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Adapun pada jenjang madrasah aliyah terdapat kecenderungan yang cukup signifikan, yaitu bahwa partisipasi madrasah swasta jauh lebih besar dibanding partisipasi madrasah negeri, yaitu sekitar 83%. Dengan partisipasi madrasah swasta yang cukup besar ini, maka dapat dikatakan bahwa secara umum sumbangan madrasah swasta terhadap pengembangan pendidikan adalah sangat besar, walaupun kontribusinya secara kualitas belum dapat dikatakan optimal, karena masih memerlukan berbagai pembenahan.⁶⁴

Demikian, apa yang menjadi kontribusi Pesantren Persatuan Islam terbesar sesungguhnya terletak pada posisinya sebagai perguruan Islam swasta yang berupaya mencetak manusia Muslim Indonesia yang *bertafaqquh fi> al-di>n*, dalam rangka menguatkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Di sini Pesantren Persatuan Islam memiliki arti yang penting bagi pendidikan Islam Indonesia, terutama dari segi penguatannya terhadap paham ini, sebagaimana dikatakan Federspiel di atas. Lembaga ini telah mengupayakan agar kaum Muslim menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya ini kiranya perlu dilakukan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.

E. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Pesantren Persatuan Islam yang untuk kali pertama dibentuk pada 1936, merupakan salah

⁶⁴ Safrudin Chamidi, "Kontribusi Sekolah Swasta bagi Pendidikan di Indonesia", dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/35/kontribusi_sekolah_swasta.htm (diunduh 24 Maret 2006). Tulisan ini dimuat dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* terbitan Balitbang Depdiknas.

satu lembaga pendidikan swasta di Indonesia. Berbeda dengan lembaga pendidikan bentukan NU atau Muhammadiyah, di mana kedua lembaga ini cukup akomodatif terhadap sistem pendidikan pemerintah, Pesantren Persatuan Islam kiranya mencoba bertahan secara mandiri dan otonom dengan menyelenggarakan sistem pendidikan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah. Ini jelas merupakan keunikan tersendiri, yang tidak dimiliki lembaga lain milik organisasi Islam.

Hingga tahun 1999, Pesantren Persatuan Islam memiliki 154 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah santri mencapai 33.792 orang. Meskipun dilihat dari arus perpolitikan Islam di Indonesia Persatuan Islam bukanlah merupakan *mainstream*, karena ia “kecil dan tidak kukuh”, sebagaimana disinyalir Federspiel, namun kontribusi lembaga pendidikannya, yang disebut Pesantren Persatuan Islam, tidak dapat diabaikan begitu saja. Secara internal, Pesantren Persatuan Islam berperan sebagai lembaga “kader” yang tentu saja bertujuan mencetak *thâifah mutafaqqihûn fi al-dîn*, yang menjadi agen “penyebarkan paham keagamaan Persatuan Islam”, yaitu paham *al-rujû’ila al-Qur’an wa al-Sunnah*. Wadah institusional ini dapat dipastikan berperan sebagai *wasilah* yang berfungsi menyebarkan doktrin-doktrin Persatuan Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, Pesantren Persatuan Islam jelas memiliki kontribusi yang besar bagi kalangan internal Persatuan Islam, yaitu sebagai ajang penggodokan paham keagamaan *ala* Persatuan Islam.

Kemudian secara eksternal, Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi utamanya dari segi kelembagaan, yaitu mengenai sistem kelembagaan yang disebut pesantren. Berbeda dengan lembaga pesantren dalam pemahaman tradisional, pesantren bagi Persatuan Islam adalah identik dengan kemodernan, yaitu tetap berorientasi “pesantren-centris”, tapi dengan sikap adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Barat. Konsep kelembagaan model pesantren ini sudah sejak lama dikembangkan oleh banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan, berdasarkan informasi terakhir, lembaga Madrasah Muallimin Muhammadiyah pun dewasa ini sedang dicobakan untuk ditransformasikan menjadi Pesantren Muallimin Muhammadiyah.⁶⁵ Dengan konsep kelembagaan seperti itu, Pesantren Persatuan Islam berhasil melahirkan ribuan kader Muslim yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka

⁶⁵ Silakan akses “Tentang Perubahan Madrasah menjadi Pesantren Muallimin Muhammadiyah” dalam <http://muallimin.org/?p=29> (diunduh 28 Januari 2010).

merupakan aset Islam Indonesia, yang dengan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, menjadi penguat Islam di Indonesia. Dengan jumlah pesantren yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, sudah dipastikan Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi yang tidak dapat diremehkan, utamanya bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Profil Mu'allimin”. 2010. dalam http://muallimin.org/?page_id=3 (diunduh 28 Januari 2010).
- “Tentang Perubahan Madrasah menjadi Pesantren Muallimin Muhammadiyah”. 2010. dalam <http://muallimin.org/?p=29> (diunduh 28 Januari 2010).
- Abdullah, M. Amin. 1997. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmadi. 2002. “Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan”. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, A. Mukti. 1970. *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan NIDA.
- Anshari, H. Endang Saifuddin. 1985. *Ahmad Hassan: Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*. Cet. I; t.tp: Firma al-Muslimun.
- Azra, Azyumardi. 1997. “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, Pengantar untuk Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- . 1999. “The Rise of Muslim Elite Schools: a New Pattern of ‘Santrization’ in Indonesia”, dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Bachtiar, Tiar Anwar. 2005. “Pendidikan Persis Mau Dibawa Ke Mana?”, dalam Tim Litbang PW Pemuda Persis Jabar (ed.), *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*. Cet. I; Bandung: Granada.
- Burhanudin, Nandang. 2000. “Menggagas Sistem Kaderisasi dan Komunikasi Handal di Lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam: Suatu Harapan dan Tantangan”, dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Persis Menjadi Mujaddid Lagi?*

Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru. Cet. I; Bandung: Alqaprint
Jatinangor-Lembaga Penerbitan Fospi.

- Chamidi, Safrudin. 2006. "Kontribusi Sekolah Swasta bagi Pendidikan di Indonesia", dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/35/kontribusi_sekolah_swasta.htm (diunduh 24 Maret 2006). Tulisan ini dimuat dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* terbitan Balitbang Depdiknas.
- Chuseno, Imam. 2003. "Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Mukhtamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Mukhtamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990)". Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.
- Darmadi, Dadi. 1999. "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat" dalam *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Cet. VI; Jakarta: LP3ES.
- Federspiel, Howard M. 1970. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University.
- . 1995. "Pesantren" dalam John L. Esposito (editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Vol. 3. New York: Oxford University Press.
- . 1999. "Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited" dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga.
- Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Komisi Tajdidut Ta'lim Ke-2 Persatuan Islam. 1984. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam*. Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Cet. VIII; Bandung: Mizan.

- Maarif, A. Syafii. 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1985. "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Cet. I; Jakarta: P3M.
- . 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- Mardiatmadja. 2010. "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam <http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm> (diunduh 20 Pebruari 2010).
- Muchtar, Abdul Latief. 1998. *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noer, Deliar. 1963. "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Duch Colonial Period (1900-1942)". Disertasi Ph.D. pada Cornell University.
- . 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1984. *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"*. Bandung: Pusat Pimpinan Persis.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng*. 1936. dalam *Al-Lisan*. Bandoeng: Persatoean Islam.
- Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1981, 1990, 1995, dan 2000.
- Rubrik Sorotan Utama. 1992. "Bertahan Gaya Pesantren" dalam *Risalah*. Bandung: Persatuan Islam.
- Soedjiarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Cet. I; Jakarta: LP3ES.

- Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam. 1999. *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan*. Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam.
- Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat. 2005. "Pengantar Editor" untuk *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*. Cet. I; Bandung: Granada.
- Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam. 1996. *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam*. Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.